

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. (Anggraini, 2018 : 8). Indeks Pembangunan Manusia dapat dicapai melalui pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat dan penduduk serta menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara dalam kualitas harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak (Sari, 2020 : 2). Indeks Pembangunan Manusia digunakan indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Badan Pusat Statistik, 2015 : 1).

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. (Mahmudi, 2016 : 140). Apabila derajat sentralisasi tinggi (derajat desentralisasi rendah) berarti tingkat kemampuan daerah tersebut rendah, demikian sebaliknya yaitu apabila derajat sentralisasi rendah, maka derajat desentralisasi tinggi yang artinya tingkat kemampuan daerah tinggi dan tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan atau sumbangan dari pemerintah pusat rendah (Nur Qomariyah, 2018 : 2-3).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri program pemerintahan. (Hudaya, 2019 : 9). Otonomi daerah dan desentralisasi mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian keuangan daerahnya sendiri. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi dapat lebih pemeratakan tingkat pembangunan sesuai wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya yang terbatas, menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kemandirian daerahnya. Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut (Masayu Rahma Wati, 2019 : 64).

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) (Mahmudi, 2016 : 141). Untuk meningkatkan pendapatan daerahnya pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan umum. Ketika pemerintah daerah telah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, maka dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dapat tercapai (Sari, 2020 : 2). Dalam pelaksanaan pelayanan publik pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber dana. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang untuk pemerintah daerah mengatur peningkatan daerahnya, juga memberikan

wewenang mengelolah kinerja keuangan. Peranan pendapatan asli daerah (PAD) sangatlah berperan dalam pengukuran kinerja pemerintahan daerah.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) ialah membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Sari, 2020 : 4). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas kinerja daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Untuk mengembangkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Novlie Manopo dkk, 2019 : 2). Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Dengan demikian maka suatu daerah yang memiliki kinerja keuangannya yang baik berarti daerah tersebut mempunyai kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab (Lazyra, 2016 : 9). Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Jika dilihat dari tabel dibawah ini pencapaian indeks pembangunan manusia di Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan.

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi tahun 2015-2019

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	78,99	79,60	80,06	80,47	80,76
Jawa Barat	69,50	70,05	70,69	71,30	72,03
Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73
D.I Yogyakarta	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99
Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77	71,50
Banten	70,27	70,96	71,42	71,95	79,99

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia : 2019

Meskipun IPM di Jawa Timur tergolong tinggi tetapi angka IPM di Jawa Timur menduduki peringkat terakhir bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Banten. Indeks pembangunan manusia (IPM) juga digunakan sebagai salah satu alokator dana alokasi umum, oleh sebab itu indeks pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai data yang strategis.

Penelitian yang dilakukan oleh Harliyani dan Haryadi (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan hasil penelitian dari Hendri dan Yafiza (2020) menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten mengenai Indeks Pembangunan Manusia. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kevalidan data dengan melakukan penelitian mengenai hubungan antara Derajat Desentralisasi dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Hudaya (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan hasil penelitian dari Sari (2020) menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten mengenai Indeks Pembangunan Manusia. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kevalidan data dengan melakukan penelitian mengenai hubungan antara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamimah (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan hasil penelitian dari Sari (2020) menunjukkan bahwa Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten mengenai Indeks Pembangunan Manusia. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kevalidan data dengan melakukan penelitian mengenai hubungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti Dkk (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan hasil penelitian dari Harliyani dan Haryadi (2016) menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten mengenai Indeks Pembangunan Manusia. Dalam hal ini

peneliti ingin mengetahui kevalidan data dengan melakukan penelitian mengenai hubungan antara Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri & Yafiza (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kevalidan data dengan melakukan penelitian mengenai hubungan antara Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian - penelitian yang sebelumnya memberikan hasil penelitian yang berbeda - beda mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka berdasarkan penelitian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Rerata Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2015 - 2019?
2. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan berpengaruh terhadap Indeks Rerata Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2015 - 2019?

3. Apakah Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Rerata Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2015 - 2019?
4. Apakah Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Rerata Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2015 - 2019?
5. Apakah Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Rerata Pembangunan Manusia pada Kabupaten atau Kota di Jawa Timur tahun 2015 - 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Rerata Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2015 - 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan terhadap Indeks Rerata Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2015 - 2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Rerata Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2015 - 2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Indeks Rerata

Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2015 – 2019.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara simultan terhadap Indeks Rerata Pembangunan Manusia pada Kabupaten atau Kota di Jawa Timur tahun 2015 – 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Data dan informasi diharapkan bermanfaat terutama :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Rerata Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019.

2. Manfaat praktis

a. Untuk penulis

Penelitian ini sebagai sarana perwujudan latihan akademik mahasiswa dalam mewujudkan karyanya serta dapat meningkatkan wawasan dan ketajaman analisis.

b. Untuk Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan mahasiswa yang unggul dalam bidangnya sebelum masuk dunia kerja, sehingga menjadi bekal bagi mahasiswa dalam persaingan dunia kerja yang akan dihadapi dikemudian hari.

c. Untuk perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kota atau Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

d. Untuk pembaca dan pihak-pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

